

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena yang sangat menarik dalam hubungan internasional pada paruh kedua abad ini adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meingkat luar biasa sebagai akibat dari peningkatan perjalanan antar negara untuk keperluan bisnis dan profesional, pariwisata, belajar keluar negeri, maupun perpindahan pengungsi yang menghindari kericuhan politik di negerinya sendiri.

Fenomena ini sangat menakjubkan karena perjalanan manusia antar Negara tersebut paling besar dilakukan untuk keperluan pariwisata, sehingga perkembangan pariwisata tersebut nampaknya merupakan industri yang memang ditakdirkan untuk dunia ketiga. Matahari yang melimpah di dunia yang ketiga, merupakan aset penting di zaman dimana orang kulit putih mengagungkan warna kulit coklat akibat sengatan matahari. Buruh murh yang disediakan Negara-negara itu menarik minat para investor perhotelan, yang menghadapi persoalan meningkatnya upah buruh dan biaya operasi di kota-kota besar Negara-negara industri, sehingga pariwisata menduduki peringkat kedua sesudah minyak sebagai penghasil devisa terbesar bagi dunia ketiga.<sup>1</sup>

Arti pentingnya industri pariwisata bagi suatu perekonomian Negara tidak hanya dirasakan oleh Negara-negara maju melainkan juga oleh Negara-negara berkembang seperti halnya dengan Indonesia yang telah menempatkan

---

<sup>1</sup> Mochtar mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* (pustaka Pelajar) hal 193

sektor pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi yang terlihat dalam GBHN 1999-2004 yang menempatkan pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi, disamping pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan.

Apabila kembali kepada konsep dasarnya pariwisata adalah suatu fenomena yang dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar dalam pembangunan nasional, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, lingkungan dan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, pariwisata bagi Negara tertentu ditetapkan sebagai *leading sektor* dari perkembangan ekonominya seperti di Negara-negara maju misalnya Prancis, Jepang, Inggris. Demikian juga di beberapa Negara di Asia seperti Cina, Malaysia, Thailand, Arab Saudi dan Uni Emirates Arab telah mengembangkan pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan ekonominya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki potensi pariwisata yang berprospek cerah untuk dikembangkan, oleh karena itu Indonesia menempatkan sektor pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi, disamping pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.<sup>3</sup> Sebagai Negara yang mempunyai potensi alam serta budaya yang kaya dan beragam, pemerintah Indonesia bertekad untuk mengembangkan pariwisata, hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang indah dan kaya akan objek wisata sebagai daerah tujuan wisata (DTW).

---

<sup>2</sup> Draft Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Nasional Tahun 2005-2009, hal. 1-3

<sup>3</sup> Ibid, hal 1-4

Dewasa ini bidang pariwisata merupakan salah satu aset negara setelah migas, sebagai akibat menurunnya penerimaan negara dari sektor minyak, maka pemerintah mencari alternatif sumber devisa selain migas sebagai penggantinya. Realisasi pengembangan sektor non migas telah banyak dilaksanakan, salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata.

Berkembang pesatnya dunia pariwisata memang sangat menguntungkan Negara Indonesia. Dengan didukung oleh besarnya potensi wisata yang ada, maka diharapkan pariwisata akan mendatangkan devisa yang besar bagi Indonesia dan dapat menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Berdasarkan keadaan geografis serta potensi alam yang terbatas, maka sektor pariwisata merupakan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Pendapatan Negara tidak hanya mengandalkan sektor migas saja tetapi non migas seperti dalam sektor pariwisata.

Meluasnya dukungan dan bantuan pemerintah dalam pembangunan pariwisata, dan mulai meningkatnya keterlibatan dari usaha kecil sampai dengan perusahaan multinasional dalam rangka berkontribusi dan mengarahkan keuntungannya pada industri pariwisata. Kesemua bukti tersebut menggambarkan tentang semakin meluasnya rasa optimis terhadap industri pariwisata sebagai media yang kuat dalam rangka mengubah struktur ekonomi dan social masyarakat.

Begitu pula halnya dengan Lombok yang merupakan bagian dari provinsi NTB dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Perkembangan kepariwisataan di daerah tersebut mengalami kemajuan yang

cukup pesat seperti daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan Lombok untuk meningkatkan pendapatan daerah setelah pertanian, sebagai wahana pencipta lapangan kerja dan sarana yang efektif untuk dijadikan alternatif utama untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata, secara potensial wilayah NTB memang berada ditempat yang sangat strategis. Dari sudut manapun melihatnya selalu ada timbal balik keuntungan dan peluang-peluangnya, maka tak heran kalau akhir-akhir ini disebutkan bahwa salah satu potensi perkembangan pariwisata di NTB karena letaknya di segitiga emas pariwisata. Disebelah barat Pulau Bali, disebelah utara tanah Toraja dan disebelah timur ada pulau Komodo. Tiga daerah tujuan wisata ini sudah mendunia sehingga lambat laun ditengah-tengahnya NTB khususnya pulau Lombok akan ikut mendunia dan terkenal sebagai kawasan wisata internasional. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pembangunan daerah dititikberatkan pada masing-masing daerah, oleh karena itu pemerintah provinsi menjadi fokus utama kepada setiap hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan, termasuk mengenai investasi asing.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan

daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.<sup>4</sup>

Adapun Visi pariwisata dari pulau Lombok itu yaitu “Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang berbudaya”. Untuk mencapai visi pariwisata tersebut dan dalam rangka mengembangkan Pulau Lombok sebagai Daerah Tujuan Wisata yang sangat potensial. Maka Pemerintah Daerah menetapkan Misi-misi dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan kunjungan wisatawan yang masuk ke Lombok, misi-misi tersebut antara lain :<sup>5</sup>

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

---

<sup>4</sup> Perda No 3 Th 2015

<sup>5</sup> Disbudpar Nusa Tenggara Barat

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan ataupun peningkatan meliputi lima hal :<sup>6</sup>

#### 1. Objek dan daya tarik wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan di suatu daerah tujuan wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, rasa nyaman, indah dan bersih, adanya ekseibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka, adanya sarana/prasarana penunjang melayani wisatawan yang hadir. Objek wisata akan mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik khusus karena dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam objek buah karya manusia pada masa lampau.

#### 2. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti listrik, air, telekomunikasi,

---

<sup>6</sup> Gamal Suwanto, Dasar-dasar Pariwisata, penerbit Andi, Yogyakarta, 1997, hal. 18

bandara, pelabuhan, terminal, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan lokasi dan kondisi objek wisata tertentu.

### 3. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, rumah makan dan restoran serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

### 4. Tata Laksana/ Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tana, seperti : jalan, jembatan, sistem pengairan, distribusi air, bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan ataupun restoran. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai. Sistem jalur

angkutan dan terminal yang memadai akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata. Sistem komunikasi memudahkan para wisatawan dalam mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Sistem keamanan atau pengawasan memberi kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata.

#### 5. Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat di sekitar objek wisata yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah dan instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata.

Disamping itu disekitar objek wisata, lingkungan alam disekitar objek wisata perlu diperhatikan secara seksama agar tak rusak dan tak cemar. Oleh sebab itu perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai peraturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

Lingkungan masyarakat dalam suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup. Oleh karena itu lingkungan budaya ini pun tak boleh tercemar oleh budaya asing,

tetapi harus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat memberi ketenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

Walaupun kunjungan wisatawan yang terus meningkat namun dalam pengembangan pariwisatanya Pemda NTB masih sangat keterbatasan dalam pendanaan. Untuk mengatasi keterbatasan kekurangan modal pembangunan, yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik diatas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber dana dari luar negeri berperan mengatasi kekurangan pendanaan pembagunan (sumber modal). Adapun bentuk bentuk dari penanaman modal asing antara lain investasi asing secara langsung (foreign direct investment), investasi tidak langsung berbentuk portopolio, serta kredit impor.<sup>7</sup> Dari bentuk-bentuk ini yang menonjol adalah investasi secara langsung (foreign direct investment), baik yang bersifat penuh maupun patungan (joint venture) dengan kekuatan ekonomi domestic. Investasi asing ini merupakan sumber-sumber baru yang dibutuhkan oleh Negara berkembang dalam membangun masa depannya.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kegiatan penanaman modal mempunyai peran penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut dengan cara peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi yang kondusif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Semakin membaiknya

---

<sup>7</sup> Sidik Jatmika, otonomi Daerah Dan Hubungan Studi Mengenai Otonomi, Demokratosasi, Globalisasi dan Investasi, Yogyakarta 2001, hal 115

<sup>8</sup> Steven J.Rusen dan Walter S.Jones. The Logic of Internasional Relation inc, Massachussetts,1980, hal.150

iklim investasi dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi investasi baik PMA maupun PMDN.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu: “**Bagaimana strategi kerjasama Internasional PEMDA Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Investor asing di bidang pariwisata ?**”

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis bertujuan :

1. Untuk memenuhi syarat wajib lulusan sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PEMDA NTB dalam mendatangkam investor asing.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis menggunakan Konsep Strategi, Konsep Paradiplomacy, dan konsep penanaman modal, untuk melihat Strategi Pemda NTB dalam mendatangkan investasi Asing di bidang pariwisata.

## 1. **Konsep Strategi**

Dalam pengertian aslinya, strategi menyangkut perang, persiapan perang dan pelaksanaan perang. Secara sempit strategi ialah “seni memproyeksikan dan mengendalikan pertempuran-pertempuran untuk mencapai tujuan perang”. Strategi berbeda dengan taktik yang merupakan “seni mengendalikan kekuatan militer dan pertempuran”. Pengertian strategi yang terbatas pada militer dan perang saja, berlaku sampai abad ke 18.

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan : kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana prasarana (Suryono,2004). Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana dan cara. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Pemda NTB sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab pembangunan dan pengembangan pariwisata memberikan izin sangat mudah kepada para investor asing sehingga pemda dan investor bekerja sama dalam pengembangan pariwisata Lombok.

Dalam hal ini Pemda NTB dalam pengembangan pariwisata memiliki tujuan utama diantaranya yaitu berkembangnya objek dan daya

tarik wisata serta sistem pemasaran yang berdaya saing global, melestarikan budaya daerah dan pemeliharaan potensi sumber daya pariwisata, meningkatkan kerjasama kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan kualitas pelayan, selain itu juga pemda bertujuan agar investor-investor asing berminat untuk berinvestasi didaerah Lombok.

## 2. **Konsep Paradiplomacy**

Paradiplomasi secara relative masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state*, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah *paradiplomacy* kali pertama diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel-diplomacy* menjadi *paradiplomacy*, yang mengacu pada makna *the foreign policy of non- central governments*, menurut Aldecoa, Keating and Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah *micro-diplomacy*.

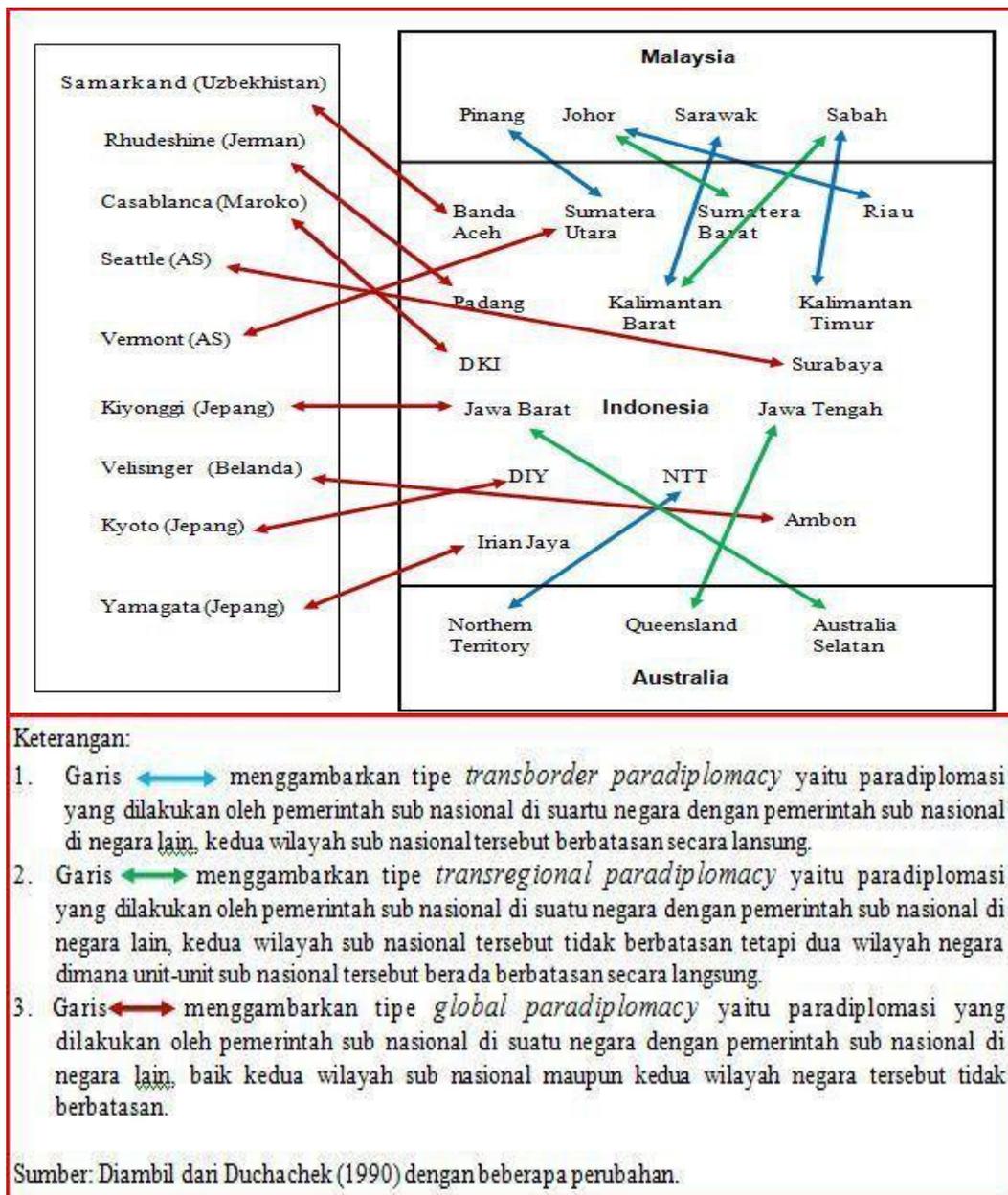
Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional dapat mengambil berbagai bentuk. Sedikitnya terdapat enam sarana yang dapat dipergunakan sebagaimana diidentifikasi oleh Duchacek. Penggunaan sarana ini sekaligus merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kepentingan mereka di arena internasional. Cara-cara

tersebut mencakup pendirian kantor-kantor perwakilan (*permanent offices*) di negara-negara lain terutama di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia, pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di satu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lainnya, pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi, pembentukan *foreign trade zone* seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat. Upaya lainnya adalah berpartisipasi dalam organisasi- organisasi atau konferensi-konferensi internasional. Sebagai contoh keikutsertaan Quebec dalam delegasi Kanada pada KTT Francophone dan keikutsertaan Pemerintah Tyrol dalam delegasi Austria pada konferensi PBB mengenai wilayah Tyrol Selatan tahun 1960-1962.

Berpijak pada aspek geografis atau kerangka kewilayahan, Duchacek membagi paradiplomasi menjadi tiga tipe. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*. Tipe paradiplomasi ini menunjuk pada hubungan institusional, formal atau pun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun secara geografis wilayah-wilayah sub nasional tersebut berbatasan langsung. Tipe paradiplomasi yang kedua, *transregional paradiplomacy*, hubungan diplomasi yang dilakukan antara dua atau lebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak berbatasan secara langsung namun negara di mana unit-unit sub nasional tersebut berada berbatasan secara langsung. Sedangkan tipe ketiga adalah *global paradiplomacy* yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah sub nasional di dua atau

lebih negara yang tidak berbatasan. Ketiga tipe tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Tipe-tipe paradiplomasi<sup>9</sup>



<sup>9</sup> Duchacek, Ivo D. "Perforated Sovereignties : Towards a Typology of new Actor in Inrenational Relation" dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos, *Federalism and International Relation: The Role of Subnational Units*, Clarendon Press, Oxford, 1990

Sementara itu, Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. Tipe kedua klasifikasi Soldatos adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu- isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya regional paradiplomacy ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Dorongan bagi pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi

meliputi:

1. Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
2. Adanya ketidakseimbangan keterwakilan unit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk “melakukan ekspansi” perannya.
4. Kegiatan para diplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala “me-tooism” yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub nasional lainnya.
5. Adanya *institutional gap* dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan inefisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional

(*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub nasional melakukan paradiplomasi sebagaimana krisis yang dialami Pemerintah Propinsi Quebec di Kanada.

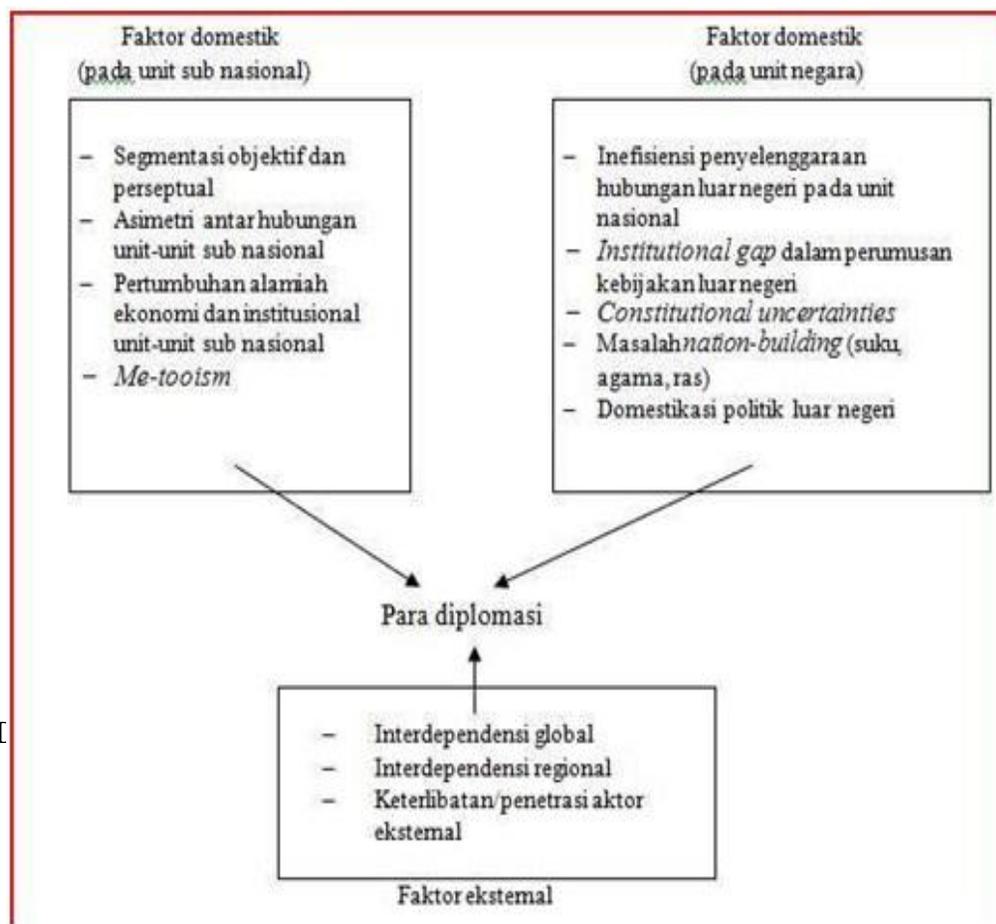
7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi konstitusional untuk melakukan paradiplomasi.

Penetrasi internasional atau intervensi dari aktor-aktor eksternal dalam isu-isu domestik yang dimotivasi kepentingan strategis politik, ekonomi, sentimen budaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasus *transborder* dan *transregional paradiplomacy*) dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasional untuk melakukan paradiplomasi. Interdependensi global khususnya antar negara industri maju membawa dampak ganda pada negara-negara berdaulat. Interdependensi telah membuka peluang adanya penetrasi kedaulatan dimana batas-batas teritorial negara tidak mampu lagi secara efektif membendung pengaruh-pengaruh eksternal di bidang ekonomi, budaya dan isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya. Pada sisi lain interdependensi global mendorong pemerintah nasional melakukan sentralisasi dalam kebijakan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru menimbulkan reaksi balik dan resistensi dari unit-unit sub nasional yang tetap berkeinginan

mempertahankan kepentingan dan perannya. Secara ringkas faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2

Faktor-faktor pendorong paradiplomacy



Sumber : Soldatos (1990)

Secara implisit mengarahkan adanya dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan antara paradiplomasi dan makrodiplomasi yakni

keduanya dapat berjalan bersesuaian (*in line*) atau sebaliknya saling berlawanan/bertentangan.

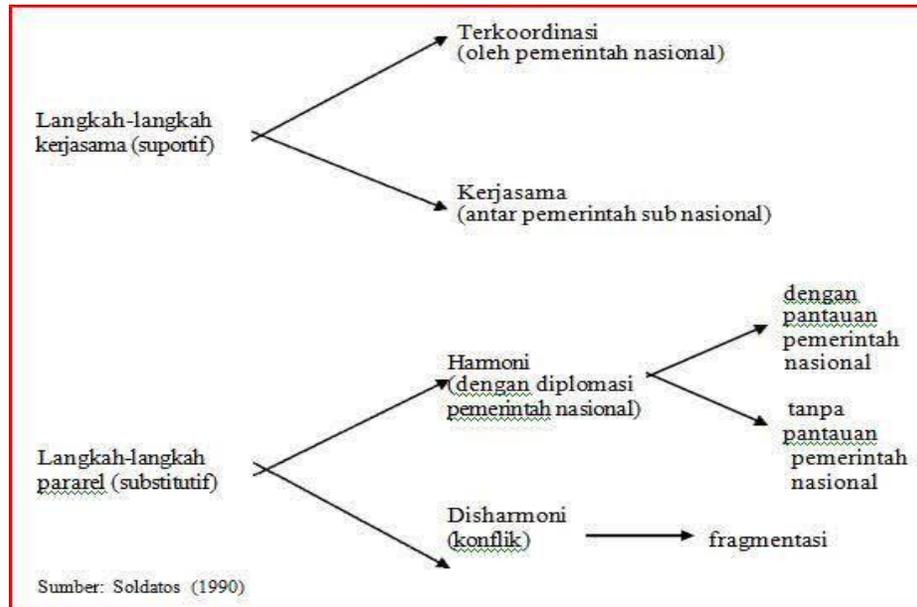
Mengenai hal ini Soldatos memberikan dua skenario utama. Pertama, paradiplomasi dan makrodiplomasi berhubungan secara kooperatif artinya paradiplomasi sifatnya suportif (mendukung makrodiplomasi). Kedua, paradiplomasi berjalan paralel dengan makrodiplomasi dan sifat paradiplomasi adalah substitutif atau pelengkap makrodiplomasi. Hubungan yang bersifat kooperatif dapat berlangsung bila pelaksanaan diplomasi oleh pemerintah sub nasional dikoordinasi oleh pemerintah nasional atau terdapat kerjasama antar pemerintah sub nasional. Sementara dalam hubungan yang sifatnya substitutive. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu hubungan yang serasi (*in harmony*) atau sebaliknya konfliktual (*disharmony*) yang pada akhirnya memunculkan fragmentasi. Gambar berikut ini menunjukkan pola-pola hubungan antara paradiplomasi dan makrodiplomasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Paradiplomasi dalam politik luar negeri Indonesia, <http://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2015

Gambar 1.3

Pola hubungan paradiplomacy dan makrodiplomasi



Konsep paradiplomasi di Indonesia dalam kewenangan melakukan kerja sama internasional dengan para investor asing dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, masuk dalam kategori kewenangan Tidak Wajib bagi Daerah. Meskipun kewenangan melakukan hubungan internasional ini bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi dunia yang telah merambah ke seluruh pelosok nusantara. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional. Daerah yang tidak terampil dalam pergaulan dunia pasti akan ketinggalan, sebab daerah itu hanya akan menjadi

konsumen pasif saja dari seluruh proses perdagangan dunia atau kapitalisme global<sup>11</sup>

Konsep Paradiplomasi di sini digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama internasional yang terjalin antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan para investor asing di bidang pariwisata. Namun, sebelum pelaksanaan kerjasama internasional tersebut DPRD dan pemerintah pusat wajib mengetahui program-program apa saja yang akan diajukan oleh pemerintah daerah provinsi NTB dan pihak asing, sehingga pemerintah dapat melegalkan perizinan dalam pelaksanaan kerjasama internasional tersebut.

Disamping itu, konsep paradiplomasi digunakan untuk mencapai kepentingan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepentingan ini berupa pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memberi informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengenai lingkungan dan budaya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di satu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lainnya, pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi, upaya lainya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi internasional. upaya ini wajib dilakukan agar nantinya dapat meminimalisasikan terjadinya kerugian

---

<sup>11</sup> Mukti, Takdir Ali, „*Paradiplomacy;Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*“, hal. 76- 77, Yogyakarta, 2013

sebagai dampak baik dari program-program yang mengalami kendala dan program-program yang gagal dalam pengimplementasiannya. Disamping itu, cara-cara ini harus dilakukan oleh pemda NTB agar pemda NTB dan para investor mengetahui bagaimana peluang investasi yang baik dan menguntungkan serta perkembangan yang ada di masing-masing pihak. Sehingga pada akhirnya, kerjasama yang terjalin dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari pihak para investor asing (PMA) dan pihak provinsi NTB.

### **3. KONSEP PENANAMAN MODAL**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Thn 2008 Hal. 3

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing disuatu negara. Menurut teori Alam M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi<sup>13</sup>. Pertama Variabel lingkungan, variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input factor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut human capital.<sup>14</sup> Adapun variabel non ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Adapun pengamat yang Juga memasukan Faktor Pemerintahan yang bersih berwibawa pada suatu negara (clean goverment and good governance) baik tuan rumah (host country) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor

---

<sup>13</sup> Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional ( Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001) hal 7

<sup>14</sup> Sidik jatmika, Otonomi daerah Dalam perspektif Hubungan internasional (Yogyakarta: Bigraf Publishing,2001) hal 79

yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. Kedua. Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan<sup>15</sup>.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan m.Rughman menyatakan bahwa penanam modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Pemda NTB secara umum sebagai tuan rumah (host Country) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing<sup>16</sup>.

Jadi dengan adanya konsep penanaman modal Pemda NTB diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Pemda NTB berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang mau menanamkan modalnya disuatu negara.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka dapat ditarik hipotesa :

---

<sup>15</sup> Alan M. Rughman , Bisnis Internasional 1 jakarta: Pt. Intermedia, 1993 hal 147

<sup>16</sup> Alan M. Rughman, bisnis Internasional 1 Jakarta PT. Intermedia, 1993

1. Pemerintah Daerah NTB mengembangkan sektor-sektor pariwisata yang potensial.
2. Pemda NTB melakukan promosi kepada calon investor serta melakukan kerjasama internasional.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan perizinan berinvestasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yakni dengan melihat secara seksama dan penuh perhatian terhadap objek yang diteliti dengan cara wawancara, yakni pengumpulan tau pengecekan malalui Tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan penjelasan menyangkut permasalahan yang diteliti. Antara lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) beserta divisi-divisinya, serta instansi-instansi pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan penelitian

### **2. Data sekunder**

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui buku-buku atau literature, data dokumen, arsip, laporan kegiatan, maupun sumber lain seperti Koran, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber yang relevan.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah yang banyak memiliki potensi pariwisata. Selain itu, posisinya yang berdekatan dengan pulau Bali yang sudah berkembang pariwisatanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang perkembangan pariwisata di Pulau Lombok, dimana penulis membahas Lombok sebagai daerah tujuan wisata, dan upaya peningkatan mutu pariwisata.

BAB III Menjelaskan tentang peraturan penanaman modal di Lombok serta peraturan di bidang pariwisata serta Menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil Pemerintah NTB untuk menarik dan meningkatkan minat para investor asing untuk berinvestasi di Provinsi NTB khususnya dibidang pariwisata.

BAB IV Upaya Peningkatan Mutu Pariwisata NTB, Strategi Promosi dan Realisasi Investasi di NTB

BAB V Kesimpulan, merupakan rangkuman pada bab-bab sebelumnya, juga berisi penegasan alasan-alasan yang digunakan.